

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal, tidak hanya mengatur bidang ibadah secara khusus tetapi juga ibadah secara umum. Islam mewarnai perilaku manusia dalam berfikir, bertindak dengan batas-batas yang telah ditetapkan tidak lain untuk mencari ridla Allah SWT. Pada hakekatnya amanah manusia dimuka bumi ini untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah SWT.

Di Indonesia Islam merupakan agama yang banyak penganutnya. Islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Di dalam Islam wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah, wakaf ibadah yang mulia karena amalan ini tidak putus pahalanya dan tetap diterima oleh *wāqif* walaupun ia telah meninggal dunia.

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah perbuatan yang dijanjikan mendapatkan pahala terus menerus. Wakaf juga merupakan salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi.¹ Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam adalah bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang atau dimiliki sendiri, tetapi harus dinikmati bersama. Ini mengingatkan pada umat manusia bahwa Islam mengajarkan harta ada fungsi sosial.

¹ Juhaya S Praya., *Perwakafan di Indonesia*. (Bandung: Yayasan Putra, 1977), hlm. 1.

Mengenai fungsi sosial tersebut, telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dengan melakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan. Upaya tersebut terus dilakukan untuk memperbaiki segmen-segmen masyarakat yang lemah, agar tercapai keadilan di berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi diwujudkan zakat bagi yang kaya, dianjurkan *ṣ addaqa* dan wakaf bagi yang mempunyai kelebihan harta benda, melarang riba dan sebagai gantinya dianjurkan penanaman modal yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Sejarah menunjukkan adanya perwakafan termasuk perwakafan tanah sejalan dengan penyebaran dakwah Islam dan pendidikan Islam. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam tersebut, seperti kepentingan ibadah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Islam dengan dua sumbernya yang pokok yaitu Al-Qur'an dan Hadis adalah agama yang lengkap, sempurna, dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Sebagai ajaran dipandang sakral atau suci oleh pemeluknya.

Pada kenyataannya adakalanya perwakafan mempunyai banyak permasalahan. Salah satunya perwakafan dalam bentuk tanah wakaf. Karena tidak tercatat secara administrasi, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa.

Hal-hal yang belum diatur secara mendalam pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendapatkan perhatian khusus seperti halnya *naẓ īr* dan saksi pada Ikrar Wakaf. Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan

dan pemeliharaan tanah wakaf diserahkan ke *naẓ īr* oleh karena tidak terdata secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan.

Tanah milik yang dijadikan tanah wakaf memang sangat rawan terhadap adanya persengketaan, persengketaan dipicu antara lain pada waktu *wāqif* (pemilik atau yang mewakafkan tanah) mengikrarkan untuk mewakafkan tanah tidak disaksikan secara langsung oleh ahli waris. Dan setelah *wāqif* mensertifikatkan tanah yang diwakafkan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lain.

Penyelesaian yang menyangkut persengketaan tanah wakaf memang harus dilakukan, agar tujuan dari perwakafan benar-benar tercapai. Dan supaya pengelola dan pengguna wakaf dapat mengambil manfaat tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam undang-undang yang berlaku sehingga terhindar dari kesalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis untuk mengadakan penelitian mengenai **“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Surakarta”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa wakaf?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Surakarta?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa wakaf.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum Islam.
- b. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat lalu dituangkan dalam bentuk skripsi.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf, sekaligus memperkaya kepustakaan hukum khususnya hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak terkait lainnya.